

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ETNIS CINA*

Oleh : Turnomo Rahardjo*

ABSTRACT

The Chinese existence in Indonesia is still a problem although they have been in this country for many generations. There is still a negative image among the natives Indonesians toward their Chinese counterpart. Therefore, the Chinese had suffered from various coercion in almost every social conflict. Besides, unclear policies of the government in handling this culturally based problem constitutes another unsolved "Chinese problem". The President's Decision Number 6, 2000, creates a "space" for a recognition of the existence of this ethnical group. However problem exist in the reaction of the "natives" Indonesians toward this decision. It is argued whether they are willing to change their (negative) view which has persisted for a long time.

Keywords: *Chinese problem, race conflict, cultural identity recognition.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dicirikan oleh adanya keragaman budaya. Keragaman tersebut antara lain terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa (etnis), dan keyakinan agama. Pada satu sisi, kemajemukan budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain pluralitas kultural tersebut memiliki potensi bagi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Pluralitas kultural sering dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih pada persoalan-persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan politik.

Secara konseptual, potensi konflik yang besar dalam masyarakat Indonesia yang multikultur secara demografis maupun sosiologis disebabkan oleh terbelahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural. Ting-Toomey (1999) menjelaskan bahwa identitas kultural merupakan perasaan (*emotional significance*) dari individu-individu untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Mereka kemudian melakukan identifikasi kultural (*cultural identification*), yaitu menegaskan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi kultural ini (Rogers & Steinfatt, 1999) pada gilirannya akan menentukan mereka ke dalam *ingroup* atau *outgroup*. Bagaimana

mereka berperilaku, sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk ke dalam budaya tertentu atau tidak.

Dalam konteks identitas dan identifikasi kultural ini, Suparlan (2002) menilai bahwa isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial etnisitas mereka. Akibatnya, perbedaan antara “siapa saya” dengan “siapa anda” atau “siapa kami” dengan “siapa mereka” terlihat dengan jelas batas-batasnya. Dalam situasi seperti itu, stereotip dan prasangka akan tumbuh dan berkembang dengan subur.

Dalam masyarakat yang terpilah ke dalam kelompok berdasarkan identitas kultural akan sulit dicapai keterpaduan sosial. Sebab, setiap kelompok berada dalam lingkup pergaulan yang eksklusif, sehingga relatif tidak intensif dalam berkomunikasi antar budaya secara efektif, yaitu komunikasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kesalahpahaman budaya, tetapi justru cenderung melakukan penghindaran komunikasi (*communication avoidance*). Akibat dari tidak adanya keterpaduan sosial, maka usaha untuk membentuk kehendak bersama (*common will*) sebagai suatu bangsa menjadi persoalan rumit dan membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Pidato Presiden Soekarno dalam memperingati Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1954 mengingatkan pentingnya memahami kemajemukan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. *“Ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat. Ingat, kita ini bukan dari satu agama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu, demikianlah tertulis di lambang negara kita, dan tekanan kataku sekarang ini kuletakkan kepada kata bhinna, yaitu berbeda-beda. Ingat kita ini bhinna, kita ini berbeda-beda ...”* (Kompas, 4 Maret 2001, hal. 31).

Gambaran secara umum yang dapat dicermati dari pernyataan di atas adalah bahwa usaha untuk membangun bangsa yang multikultural, yaitu kondisi masyarakat yang mampu memberi apresiasi terhadap perbedaan-perbedaan kultural, ras, dan etnis (Speight dalam Deetz, 1993) atau pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan memberi manfaat satu sama lain (Rogers & Steinfatt, 1999) masih dalam tahapan mencari bentuk. Multikulturalisme (Shuter dalam Deetz, 1993) mempersyaratkan pemeliharaan (*preservation*) yang tidak dapat dirubah dari setiap budaya, yaitu nilai-nilainya, pandangan-pandangannya, dan pola-pola komunikasinya.

Ketimpangan ekonomi, sosial dan politik serta ketidakmampuan masyarakat dalam memahami keragaman kultural mengakibatkan

terjadinya pertikaian antar-kelompok. Konflik SARA terutama pertikaian antar etnis telah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Surat

kabar *Kompas* menyajikan data tentang *sebagian* dari peristiwa kerusuhan sosial yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1994-2001.

Tabel 1. Konflik Sara Di Indonesia Tahun 1994-2001

Tanggal	Lokasi	Pemicu
10 Oktober 1994	Situbondo, Jatim	Bermula dari perbedaan pendapat antara santri muda dengan seorang kiai senior. Karena dianggap melecehkan agama, masyarakat menuntut santri muda itu dihukum mati. Namun, pengadilan hanya memvonis 5 tahun penjara. Terjadilah amuk massa dengan membakar gereja dan penjarahan toko milik etnis Cina.
1 Januari 1997	Sanggau Ledo, Kalbar	Perkelahian antara pemuda etnis Dayak dengan etnis Madura pada malam menyambut Tahun Baru yang berbuntut pada aksi balas dendam.
15 September 1997	Makassar, Sulsel	Berawal dari terbunuhnya seorang anak berusia 9 tahun oleh seorang pengidap sakit jiwa keturunan Cina. Akibatnya massa menjadi marah, mereka menyerang dan membakar rumah, toko, tempat hiburan milik etnis Cina dan vihara.
19 Januari 1998	Ambon, Maluku	Dipicu oleh perkelahian antara pengemudi kendaraan umum dengan penumpang yang akhirnya menjadi perkelahian antar agama.
13 dan 14 Mei 1998	Jakarta	Kerusuhan rasial yang diikuti oleh penjarahan dan pembakaran tempat-tempat bisnis serta pelecehan seksual terhadap perempuan keturunan Cina.
21 Februari 1999	Sambas, Kalbar	Bermula dari seorang penumpang angkutan umum yang tidak mau membayar, sehingga terjadi perkelahian yang melukai sopir dari etnis Dayak yang dilakukan oleh penumpang etnis Madura. Kejadian tersebut berbuntut pada aksi balas dendam etnis Dayak.

Kebijakan Pemerintah Tentang Etnis Cina (Turnomo Raharjo)

27 Juli 1999	Batam, Riau	Pertikaian etnis terjadi akibat rebutan penumpang antara warga etnis Flores dengan warga etnis Batak. Pertikaian tersebut akhirnya menjadi kerusuhan massa antara kedua kelompok etnis.
6 Oktober 2000	Wamena, Irian Jaya	Penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat Brimob yang mengakibatkan kemarahan penduduk asli Papua.
18 Februari 2001	Sampit, Kalteng	Empat anggota dari keluarga etnis Madura dibunuh, diduga pelakunya orang Dayak, kemudian ratusan etnis Madura menyerang satu keluarga etnis Dayak. Ribuan warga etnis Dayak, bahkan dari pedalaman memasuki kota untuk melakukan pembersihan etnis Madura.

Sumber: Surat kabar *Kompas* 4 Maret 2001

Pertikaian SARA juga melibatkan warga etnis Cina, baik sebagai faktor pemicu (langsung) terjadinya kerusuhan atau pun karena imbas dari kerusuhan sosial yang diakibatkan oleh konflik politik, seperti misalnya “Peristiwa Mei 1998” di Jakarta dan beberapa kota lain menjelang berakhirnya kekuasaan pemerintah Orde Baru.

Tabel 2. Konflik Sara Yang Melibatkan Warga Etnis Cina

Tanggal	Lokasi	Pemicu
30 Januari 1997	Rengas Dengklok, Jabar	Seorang warga etnis Cina merasa terganggu oleh ulah para pemuda yang membangunkan umat Islam untuk melaksanakan sahur.
13-14 Mei 1998	Jakarta dan kota-kota lain	Krisis politik menjelang tumbangannya rezim Orde Baru yang berimbas pada munculnya tindakan kekerasan terhadap warga etnis Cina.
7 September 1998	Kebumen, Jateng	Kemarahan majikan (etnis Cina) terhadap anak buahnya (etnis Jawa) yang menumpahkan oli. Kejadian tersebut kemudian dimanipulasikan sebagai penganiayaan terhadap seorang pribumi.
15 September 1998	Bagan Siapi-api, Sumut	Dipicu oleh isu seorang warga pribumi yang meninggal di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda etnis Cina.

Sumber: Widiyanto dalam *Prisma* No. 1 Tahun XXVII – 1998 dan data tambahan dari penulis.

Pertikaian antar etnis yang terjadi di hampir sepanjang jalur negeri ini sebenarnya ingin menegaskan kembali bahwa sifat multikultur atau kemajemukan budaya masyarakat Indonesia merupakan persoalan yang perlu dikelola dengan serius. Dalam arti, perlu ada penanganan yang sifatnya mendasar. Dalam banyak peristiwa konflik, penanganannya masih sebatas mengurangi ketegangan. Cara penyelesaian seperti itu tidak akan pernah menyentuh akar persoalan dari kelompok-kelompok yang bertikai.

Berbagai peristiwa konflik yang terjadi, beberapa diantaranya telah mencapai tataran prasangka yang paling tinggi : eksterminasi (*extermination*), yaitu ekspresi prasangka yang diwujudkan dalam bentuk hukuman mati tanpa peradilan (*lynchings*), pembunuhan massal yang terorganisasi (*pogroms*), pembunuhan besar-besaran (*massacres*) dan pemusnahan terhadap kelompok etnis tertentu (*genocides*). “Peristiwa Mei 1998” (konflik anti Cina), “Peristiwa Sanggau Ledo, Sambas, Sampit” (pertikaian antar etnis: Dayak/Melayu dengan Madura) dan “Peristiwa Ambon, Poso” (konflik antar agama) merupakan bukti nyata yang menunjukkan adanya perilaku eksterminasi tersebut.

Realitas empirik tentang konflik antar etnis di Indonesia memberi indikasi bahwa pertikaian tersebut telah menyentuh basis identitas

kultural dari pihak-pihak yang bertikai. Komunitas etnis tertentu yang selama ini merasa terpinggirkan secara ekonomi, sosial dan politik serta terlebih lagi mengalami penindasan budaya mencoba mendapatkan kembali hak-hak yang dimilikinya. Hak kebudayaan yang dimaksud (Hartman, 2000) adalah suatu garansi yang memberikan ruang bebas agar orang dapat mengekspresikan ide-idenya, dan secara individual melaksanakan imajinasi-imajinasinya dalam konteks tradisi yang mereka warisi.

Pengakuan terhadap identitas kultural sebagai hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok etnis juga dirasakan oleh warga etnis Cina di Indonesia. Keberadaan mereka hingga sekarang masih menjadi persoalan. Warga etnis Cina belum diterima secara penuh sebagai bagian dari anggota bangsa Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya istilah baku bagi orang Cina yang telah menanggalkan akar-akar kultural mereka dari negeri asal. *Chinese diaspora* (Beng dalam Suryadinata, 1997), sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan tentang orang Yahudi yang menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak dapat diterima oleh etnis Cina karena mereka sebenarnya memiliki *sense of belonging* terhadap negara dimana mereka tinggal, namun pemerintah masih memperlakukan keturunan Cina sebagai orang asing.

Pengakuan terhadap identitas kultural (etnis Cina) merupakan salah satu bagian dari “masalah Cina” yang belum terselesaikan. Di kalangan masyarakat etnis non Cina (pribumi) masih berkembang pandangan yang tidak menguntungkan terhadap keberadaan etnis Cina, seperti misalnya stereotip yang mengatakan bahwa warga etnis Cina bersikap arogan, memandang rendah masyarakat Indonesia asli, cenderung eksklusif dan mempertahankan hubungan “kekerabatan” dengan Cina daratan.

Disamping masih berkembangnya stereotip negatif di kalangan pribumi terhadap etnis Cina, kebijakan pemerintah yang tidak jelas dalam menangani persoalan berbasis kultural, merupakan wujud nyata dari “masalah Cina” yang belum terselesaikan tersebut. “Masalah Cina” di Indonesia sangat berkaitan dengan sikap dan kebijakan pemerintah yang tidak cukup

tegas dalam persoalan kewarganegaraan etnis Cina. Disamping itu, Beng (dalam Suryadinata, 1997) menilai bahwa kebijakan asimilasi yang diterapkan menjadi salah arah (*misguided*), karena muncul pandangan bahwa loyalitas etnis Cina hanya dapat dicapai melalui pengingkaran terhadap ciri-ciri kultural mereka. Dalam kenyataannya, keragaman adalah sebuah fakta kehidupan, dan kesatuan dalam keberagaman (*unity in diversity*) dapat dicapai tanpa harus melakukan penyeragaman.

Jika dirunut berdasarkan perjalanan sejarahnya, maka apa yang dikenal dengan “masalah Cina” dapat dicermati dari akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil paling tidak sejak pemerintah Orde Lama hingga pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Liem (2000) mencatat beberapa peristiwa besar tentang keberadaan etnis Cina di Indonesia.

Tabel 3. Kebijakan Tentang Etnis Cina Di Indonesia

Tahun	Peristiwa
1960	Program pribumisasi pemerintah (Perpu No. 10) yang melarang warga Indonesia keturunan Cina untuk berdagang di tingkat pedesaan. Sekitar 120.000 warga dipulangkan ke RRC atau pun negara-negara lainnya.
1965	Warga etnis Cina ditangkap dan dibunuh tanpa proses pengadilan atau prosedur yang jelas atas tuduhan komunisme. Di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa, ribuan anak-anak keturunan Cina yang ikut dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi meninggal karena kelaparan dan kekurangan gizi.
1967	Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 yang melarang agama, kepercayaan, ekspresi seni, kebudayaan, dan sastra Cina.
1998	Sentimen anti-Cina yang muncul di kalangan masyarakat sejak dulu menemukan puncaknya pada kerusuhan rasial 14-15 Mei yang berakhir dengan penjarahan dan pemerkosaan terhadap warga etnis Cina.

2000	Dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000 untuk mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 membuat ruang “demokrasi” mulai dibuka kembali.
------	--

Sumber: Yusiu Liem, 2000, hal. IX – X

Dalam konteks kebijakan untuk mencari solusi terhadap “masalah Cina”, di masa Orde Lama berkembang dua arus pemikiran utama tentang hubungan antara pribumi-non pribumi (Taher, 1997). Arus pemikiran pertama adalah *paham integrasi* yang intinya mencita-citakan agar keturunan Cina di Indonesia diakui sebagai salah satu etnis, sebagaimana etnis Jawa, Sunda atau Minangkabau. Paham ini dianut dan diperjuangkan oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Kesetaraan kelompok etnis yang diperjuangkan Baperki dinilai oleh Coppel (2002) sebagai lebih dekat dengan konsep masyarakat multi-kultur, meskipun kata *integrasi* itu sendiri sudah ketinggalan zaman (*out of fashion*).

Arus pemikiran kedua adalah paham asimilasi yang pada dasarnya menganjurkan agar keturunan Cina di Indonesia mem-baur dengan masyarakat lokal. Paham ini dikembangkan dan diperjuangkan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) dan dilanjutkan oleh Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa).

Di masa Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijakan asimilasi sebagai solusi untuk mengatasi

“masalah Cina”. Kebijakan tersebut ditempuh setelah Baperki yang bertindak sebagai motor yang menggerakkan paham integrasi dianggap memiliki pertalian yang erat dengan gerakan komunis di Indonesia beberapa tahun menjelang pemberontakan G30S/PKI. Sebagai sebuah organisasi massa, Baperki menjadi tidak berfungsi seiring dengan tumbanganya PKI. Banyak tokoh Baperki yang ditangkap atau melarikan diri ke luar negeri (Thung Ju Lan dalam Wibowo, 1999; Taher, 1997). Dengan diterimanya program asimilasi sebagai solusi nasional untuk mengatasi “masalah Cina”, maka pada saat yang bersamaan dikeluarkan beberapa regulasi yang “mendukung” kebijakan asimilasi tersebut, yaitu 1) Pelarangan sekolah dan penerbitan berbahasa Cina; 2) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Pergantian Nama; 3) Instruksi Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan dan adat istiadat keturunan Cina; 4) Keputusan Presiden No. 240/1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing; dan 5) Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

Dalam penilaian Suryadinata (1997), kebijakan asimilasi di

Indonesia merupakan kebijakan yang paling radikal, sebab kebijakan tersebut telah menghilangkan 3 pilar yang menyangga keberadaan masyarakat dan identitas kultural etnis Cina, yaitu sekolah, media massa, dan asosiasi-asosiasi etnis Cina. Sedangkan Suparlan (2000) memberikan pandangan yang berbeda tentang praktik asimilasi terhadap warga etnis Cina. Masyarakat Indonesia yang majemuk didasarkan pada prinsip kebangsaan, namun memiliki sistem nasional yang askriptif primordial secara etnisitas. Dalam perspektif tersebut, seseorang tidak bisa menjadi orang Indonesia jika ia tidak menjadi anggota dari salah satu kelompok etnis yang ada dan digolongkan sebagai pribumi. Karenanya, tidak mengherankan bila kebijakan asimilasi menjadi gagal sebab meskipun orang Cina sudah berganti nama atau berpindah keyakinan agama (bukan Khonghucu), tetapi tetap saja mereka masih digolongkan sebagai bukan orang Indonesia. Ringkasnya, asimilasi gagal karena kebijakan itu sendiri tidak jelas. Orang Cina akan diasimilasikan ke dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat etnis?

Di masa Orde Baru pula Wibowo (1999) mencatat munculnya berbagai kebijakan untuk warga etnis Cina yang dapat dipilah ke dalam tiga gugus, yaitu : 1) *Gugus Stigmatisasi*. Kebijakan ini dirumuskan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia

No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 yang melarang pemakaian kata "Tionghoa" dan menggantikannya dengan kata "Cina". Keputusan ini dinilai telah menciptakan stigma dalam masyarakat, bahwa etnis Cina identik dengan semua perilaku negatif : tidak patriotik, eksklusif, tidak memiliki kepedulian sosial dan sebagainya; 2) *Gugus Marjinalisasi*. Merupakan kelanjutan dari kebijakan stigmatisasi. Karena berperilaku negatif, maka etnis Cina harus dijauhkan. Pada awal kekuasaan Orde Baru dikeluarkan serangkaian kebijakan yang menetapkan supaya golongan Cina keluar dari lingkaran tengah mayoritas. Kebijakan tersebut diawali dengan sistem kuota sekolah, kemudian diikuti dengan larangan segala aktifitas kebudayaan Cina, seperti bahasa Cina, perayaan tradisional Cina, dan agama Cina; dan 3) *Gugus Viktimisasi*. Kebijakan ini dinilai sebagai usaha untuk menjadikan etnis Cina sebagai "binatang korban", tidak dirumuskan ke dalam sebuah dokumen hukum, tetapi dipraktikkan secara luas dari cara yang halus sampai cara yang kasar, seperti tindakan pemerasan dalam urusan dengan birokrasi.

Berdasarkan rangkaian peristiwa yang terkait dengan keberadaan etnis Cina di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, maka "Masalah Cina" dapat dirumuskan secara skematis berdasarkan aspek-aspek politik, ekonomi, kultural, dan hukum.

Tabel 4. Peta “Masalah Cina” Di Indonesia

Bidang	Pemerintahan	Masalah
Politik	Hindia Belanda Orde Lama Orde Baru	Stratifikasi sosial yang diskriminatif: Eropa, Timur Asing, Pribumi. Munculnya 2 arus pemikiran yang berbeda: asimilasi dan integrasi/akomodasi. Asimilasi sebagai solusi nasional: usaha mereduksi ciri-ciri kecinaan. Stigmatisasi. Marjinalisasi. Viktimisasi.
Ekonomi	Hindia Belanda Orde Lama Orde Baru	Monopoli penjualan candu, perantara jual beli antara pemerintah dengan pribumi dan hak untuk memungut pajak. Larangan berdagang di tingkat pedesaan bagi warga keturunan Cina (Perpu No. 10 Tahun 1960). Akumulasi dan pendayagunaan modal milik etnis Cina dengan alasan pemulihan ekonomi.
Kultural		Sikap etnosentris warga keturunan Cina, karena menganggap kebudayaan Cina sebagai kebudayaan yang tertua di dunia. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam masih diidentikkan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Juga, ajaran Islam dipandang terlalu keras, sehingga sulit diadaptasikan ke dalam nilai-nilai budaya etnis Cina.
Hukum	Orde Lama Orde Baru Reformasi	Larangan berdagang bagi warga keturunan Cina di tingkat pedesaan (Perpu No. 10 Tahun 1960). Pelarangan sekolah dan penerbitan berbahasa Cina. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang pergantian nama. Pelarangan terhadap agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina (Inpres No. 14/1967). Kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing (Keppres No. 240/1967). Kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina (Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967). Keppres No. 6/2000 tentang pencabutan Inpres No. 14/1967.

Mencermati berbagai per- “masalah Cina” di atas, maka soal-an yang terangkum dalam masalah (*research questions*) yang

dapat dirumuskan dalam studi ini adalah : 1) Konflik sosial yang berulang kali terjadi dan melibatkan eksistensi warga etnis Cina sebagai sasaran menjadi pertanda bahwa struktur masyarakat masih dipahami dalam dikotomi antara *ingroup* dengan *outgroup*. Mengapa keadaan ini masih terjadi dan usaha apa yang perlu dilakukan agar setiap kelompok bisa menghargai perbedaan-perbedaan kultural (etnisitas)? 2) Pengakuan terhadap identitas kultural merupakan hal yang esensial bagi subjektivitas warga etnis Cina untuk menjawab pertanyaan yang paling dasar dari eksistensinya sebagai manusia. Namun, sebagai kelompok (etnis) yang sudah turun-temurun menetap di Indonesia, mengapa keberadaan mereka masih menjadi persoalan?

Berdasarkan pemikiran di atas, maka studi ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman etnis Cina dalam memahami persoalan pengakuan identitas kultural mereka.

Studi ini diharapkan tidak saja memiliki signifikansi praktis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi secara akademis/teoritis. Dalam tataran praktis, studi ini diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana individu-individu dari kelompok etnis yang berbeda (etnis Cina dengan etnis non Cina) dapat menegosiasikan identitas kultural masing-masing dalam sebuah "ruang sosial" yang memungkinkan mereka bisa bertemu, berkomunikasi, dan saling mempengaruhi.

Secara akademis/teoritis, studi ini merupakan usaha untuk mengembangkan pemikiran teoritik tentang model atau bangunan komunikasi antar etnis yang sesuai bagi hubungan antara etnis Cina dengan etnis non Cina. Bangunan komunikasi antar etnis yang dimaksud adalah apakah dalam wujud pemikiran teoritik tentang budaya ketiga (*third-culture*) atau multikulturalisme.

Dalam tataran teoritik makro, studi ini merujuk pada gagasan dari *genre interpretif*, yaitu pemikiran teoritik yang berusaha menjelaskan suatu proses dimana pemahaman (*understanding*) terjadi dan membuat perbedaan yang tajam antara pemahaman dengan penjelasan ilmiah (Little John, 1999). Tujuan dari interpretasi bukan untuk menemukan hukum yang mengatur kejadian-kejadian, tetapi berusaha mengungkap cara-cara yang dilakukan orang dalam memahami pengalaman mereka sendiri. *Genre interpretif* ini dipakai sebagai landasan berpikir dengan pertimbangan bahwa pengakuan terhadap identitas kultural merupakan hal yang dirasakan dan dialami secara subjektif oleh setiap individu. Dengan identitas kultural yang melekat dalam diri seseorang, maka ia akan dapat menjawab pertanyaan yang paling dasar dari eksistensinya sebagai manusia, yaitu "Siapa Saya?". Tanpa pengakuan identitas, subjektivitas seseorang menjadi tidak jelas, sehingga

eksistensinya pun akan selalu dipertanyakan.

Sejalan dengan gagasan *genre interpretif* yang menekankan pada pengalaman subjektif dalam memahami suatu fenomena, maka studi ini berusaha menerapkan pemikiran dari paradigma *pluralist* tentang heterogenitas masyarakat dalam memahami realitas. Gagasan paradigma *pluralist* ini merupakan cerminan dari sifat manusia yang memiliki kehendak bebas dan berpikir secara rasional (Perdue, 1986). Disamping itu, studi ini juga merujuk pada gagasan dari pendekatan *subjectivist* yang berusaha menjelaskan suatu fenomena yang dikaji dari dalam (*understanding, verstehen*). Komunikasi, dalam perspektif *subjectivist*, hanya dapat dipahami dari sudut pandang partisipan komunikasi, mereka memiliki "otonomi" dan "kehendak yang bebas" (Asante & Gudykunst, 1989).

Pendekatan teoritik yang sejalan dengan perspektif makro di atas adalah fenomenologi. Asumsi pokok dari gagasan fenomenologi adalah bahwa orang secara aktif akan menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna terhadap apa yang mereka lihat. Interpretasi (*understanding, verstehen*) merupakan proses aktif dalam memberikan makna terhadap sesuatu yang diamati, seperti misalnya sebuah teks, sebuah tindakan atau suatu situasi, yang kesemuanya dapat disebut sebagai pengalaman (*experience*). Karena

sebuah pesan atau tindakan lain dapat bermakna banyak hal, maka makna tidak dapat secara sederhana ditemukan (*discovered*). Interpretasi, berdasarkan definisinya, merupakan sebuah proses aktif dari pikiran (*mind*), sebuah tindak kreatif dalam mencari berbagai kemungkinan makna.

Husserl (dalam Bertens, 2002; Adian, 2002) mengatakan bahwa fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak (*phainomenon*). Dengan demikian, seperti yang sudah tersirat di dalam namanya, fenomenologi mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri atau *fenomen* ke pengalaman subjek. Fenomen dalam pemahaman Husserl adalah realitas sendiri yang tampak. Menurutnya, tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan kita dari realitas, karena realitas itu sendiri tampak bagi kita. Dengan berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman, maka esensi dapat terumuskan secara jernih.

Gagasan teoritik yang menggunakan pendekatan fenomenologi adalah *co-cultural theory* yang merupakan hasil pemikiran dari Orbe (Gudykunst dalam Gudykunst & Mody, 2002). Orbe lebih memilih kata *co-culture* daripada terminologi lain seperti *subcultural, subordinate*, dan *minority* (Kim dalam Gudykunst, 2002) untuk menegaskan pemahaman bahwa tidak ada satu pun budaya dalam masyarakat yang lebih

unggul (*superior*) terhadap budaya-budaya yang lain.

Teori ini dilandasi oleh gagasan teori kelompok diam (*muted group theory*). *Co-cultures* mencakup tidak saja kelompok *nonwhites*, perempuan, penyandang cacat, gay dan lesbian, tetapi juga kelompok lain yang berada pada kelas sosial rendah. Menurut Orbe, “dalam bentuknya yang paling umum, komunikasi *co-cultural* merujuk pada interaksi diantara para anggota kelompok *under-represented* dengan kelompok dominan”. Fokus dari teori *co-cultural* adalah memberikan sebuah kerangka dimana para anggota *co-cultural* menegosiasikan usaha-usaha untuk menyampaikan suara diam mereka dalam struktur masyarakat dominan.

Ada dua premis dalam teori *co-cultural*, yaitu : 1) Para anggota kelompok *co-cultural* terpinggirkan (*marginalized*) dalam struktur masyarakat dominan; dan 2) Para anggota *co-cultural* menggunakan gaya-gaya komunikasi tertentu untuk meraih keberhasilan ketika berhadapan dengan “struktur-struktur dominan yang opresif”. Orbe menyebutkan strategi-strategi komunikasi *co-cultural* secara spesifik dari *avoiding*, *mirroring*, *embracing*, *stereotypes*, dan *censoring self* menuju *educating others*, *bagaining*, *attacking* dan *sabotaging others*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pada umumnya para anggota *co-cultural* memiliki satu dari tiga tujuan ketika mereka berinteraksi dengan

para anggota kelompok dominan, yaitu : 1) *Assimilation*: menjadi bagian dari kultur dominan (*mainstream*); 2) *Accomodation*: berusaha agar para anggota kelompok dominan dapat menerima keberadaan para anggota *co-cultural*; dan 3) *Separation*: menolak kemungkinan ikatan bersama dengan para anggota kelompok dominan.

Dalam studi komunikasi antar budaya (*intercultural communication*), terdapat beberapa model atau bangunan komunikasi yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda terhadap usaha untuk memahami keterpaduan sosial. Bangunan komunikasi yang pertama dikenal dengan *third-culture* atau budaya ketiga (Dodd, 1998). Budaya ketiga diciptakan oleh partisipan A dan partisipan B dimana mereka mengesampingkan budaya asal mereka guna memberi penekanan pada landasan bersama. Dalam suatu kontak antar budaya, mereka memfokuskan pada konstruksi budaya baru tersebut. Para partisipan tidak perlu memfusikan identitas kultural mereka, tetapi lebih pada usaha untuk menciptakan sebuah arena bersama, paling tidak pada waktu mereka membutuhkan untuk berkomunikasi.

Gagasan yang berbeda tentang budaya ketiga diperkenalkan oleh Casmir (dalam Deetz, 1993). Bangunan budaya ketiga ini berasumsi bahwa transaksi-transaksi antar budaya akan dapat mencapai efektifitasnya yang optimal apa para

partisipan berusaha keras untuk mengembangkan budaya ketiga, yaitu integrasi dari latar belakang kultural kedua individu yang menghasilkan sebuah pengalaman kultural baru dan berbeda, yaitu pengalaman kultural yang diintegrasikan.

Bangunan komunikasi yang lain adalah multikulturalisme, yaitu pengakuan terhadap beberapa kultur yang berbeda yang dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi pluralisme kultural (Suryadinata, 2000; Rogers & Steinfatt, 1999). Asumsi-asumsi dari pemikiran multikulturalisme bertentangan dengan konsep budaya ketiga (Shuter dalam Deetz, 1993), yaitu : 1) Negosiasi dan konvergensi kultural yang melekat dalam budaya ketiga merupakan *anathema* (hal yang ditabukan) oleh tujuan multikulturalisme yang berusaha mempertahankan dan mentransmisikan budaya yang tidak dapat dirubah oleh kekuatan-kekuatan relasional maupun eksternal; 2) Bila budaya ketiga mengedepankan sisi positif dari adaptasi kultural dalam suatu hubungan, maka multikulturalisme berusaha memelihara identitas kultural dengan segala konsekuensinya; dan 3) Budaya ketiga merupakan sebuah proses *etic*, karena budaya ketiga menekankan pada kesamaan (*commonality*) daripada perbedaan (*difference*) dan beru-

saha menciptakan budaya baru untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan. Multikulturalisme, pada sisi yang lain, bersifat *emic* karena mempersyaratkan pemeliharaan yang tidak dapat dirubah dari setiap budaya tentang nilai-nilainya, *worldview* dan pola-pola komunikasinya.

Studi ini merujuk pada gagasan dari paradigma interpretif, yaitu usaha untuk memahami pengalaman individu-individu etnis Cina dan etnis non Cina (Jawa) sebagai pelaku sosial dalam menginterpretasikan hubungan antar etnis yang terjalin selama ini. Disamping itu, studi ini juga berusaha untuk menjelaskan pengalaman etnis Cina dalam memahami identitas kultural mereka.

Subjek penelitian ini adalah individu-individu etnis Cina dan etnis Jawa yang bertempat tinggal di wilayah Sudiroprajan, Solo. Secara konseptual, Solo dipilih sebagai wilayah penelitian dengan pertimbangan bahwa dalam skala kecil kota tersebut merupakan representasi dari masyarakat multietnis. Disamping itu, Solo merupakan wilayah yang sering terjadi konflik antar etnis. Dalam catatan sejarah, Solo merupakan kota yang pertama kali menciptakan konflik rasial anti Cina. Sedangkan penetapan Sudiroprajan sebagai wilayah penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa karakteristik kawasan permukiman tersebut memungkinkan individu-individu etnis Cina dan

etnis Jawa dapat berkomunikasi dengan intensitas yang relatif tinggi.

Satuan analisis dari studi ini adalah individu-individu dari masing-masing kelompok etnis. Disamping itu, dengan mempertimbangkan bahwa pemahaman identitas kultural bukan hal yang bersifat baku (*fixed*), maka individu-individu etnis Cina diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur 30-an dan 60-an. Selain usaha untuk memperoleh data pada tataran individual, studi ini juga berusaha mendapatkan data pada tataran kelembagaan. Lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam studi ini adalah Persatuan Masyarakat Solo (PMS), Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) dan, Paguyuban Wong Solo (PWS).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam catatan sejarah (Mulyadi dkk., 1999) permukiman di wilayah Sudiroprajan sudah terbentuk sejak zaman pemerintah kolonial Belanda bersamaan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan massal terhadap etnis Cina di Batavia sekitar tahun 1745 yang dikenal dengan "Peristiwa Roa Malaka" atau "Keberingasan Batavia" (*Batavian Fury*) dimana tidak kurang dari 100.000 orang etnis Cina mati terbunuh (Yusiu Liem, 2000). Solo atau tepatnya Kartasura yang pada waktu itu menjadi ibukota kerajaan menjadi tempat pelarian etnis Cina dari Batavia. Sunan Paku Buwono II yang memerintah Keraton Kartasura Hadiningrat sangat terbuka terhadap

kehadiran etnis Cina yang menyelamatkan diri dari usaha pembunuhan masal tersebut.

Sudiroprajan terletak di sebelah Utara Kali Pepe yang meliputi wilayah Ketandan, Limalasan, Balong, dan Warung-pelem. Pemerintah kolonial Belanda sengaja melakukan kebijakan permukiman yang eksklusif dengan memanfaatkan sungai sebagai garis pembatas. Jika etnis Cina ditempatkan di sekitar Kali Pepe (wilayah Pasar Gede), maka keturunan Arab ditempatkan di sekitar Kali Wingko (wilayah Pasar Kliwon). Tujuan dari penetapan wilayah yang eksklusif ini adalah untuk menghambat interaksi antar kelompok etnis. Di bawah pemerintah kolonial Belanda, Sudiroprajan yang menjadi tempat bermukim etnis Cina dipimpin oleh "Babah Mayor" yang bertugas sebagai penghubung antara orang Cina dengan pemerintah kolonial dalam berbagai kepentingan. Dalam konteks kebudayaan, warga etnis Cina di Sudiroprajan diharuskan menjalankan kebiasaan kultural warisan leluhur, sehingga identitas kultural mereka sebagai orang Cina masih tetap bisa dipertahankan.

Hal yang menonjol dari Sudiroprajan adalah bahwa sebagian besar orang Cina yang bertempat tinggal di Solo, nenek moyangnya berasal dari Kampung Balong, salah satu bagian dari wilayah Sudiroprajan. Mayoritas warga etnis Cina di Sudiroprajan menjadi penganut agama Kristen atau Katholik.

Sedangkan mereka yang masih memeluk keyakinan Khonghucu sudah tidak banyak dijumpai. Dalam kesehariannya, mereka menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang Jawa. Bahasa Cina (Mandarin) cenderung sudah tidak lagi mereka pahami, hanya orang Cina generasi tua saja yang relatif masih bisa berkomunikasi dengan memakai bahasa Cina.

1. Persoalan Pengakuan Identitas Kultural dan Eksistensi Etnis Cina

a. Pengalaman Etnis Cina Generasi 60-an

Dalam catatan pengalaman para informan paling tidak ada dua hal yang menjadi pemicu munculnya kerusuhan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan warga etnis Cina di Solo. Penyebab pertama, menurut mereka adalah kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi antara orang Cina yang dianggap kaya dengan pribumi (orang Jawa) yang kebanyakan miskin. Kesenjangan ekonomi itu kemudian dijadikan isu oleh kelompok kepentingan tertentu untuk melakukan provokasi kepada masyarakat.

Sudiroprajan, menurut mereka, merupakan wilayah yang relatif aman dari kerusuhan anti Cina. Sebab, di lingkungan permukiman tersebut hampir tidak ada lagi perbedaan yang mencolok antara orang Cina

dengan orang Jawa. Tingkat kehidupan sosial-ekonomi warga kedua kelompok etnis tersebut relatif sama. Mereka juga sudah lama berinteraksi, sehingga sudah mengenal dengan baik karakteristik masing-masing kelompok etnis.

Asimilasi atau pembauran yang pernah dijadikan kebijakan nasional pada masa pemerintah Orde Baru, diberi arti yang berbeda oleh para informan yang pada intinya ingin menjelaskan tentang usaha menciptakan persaudaraan antara warga etnis Cina dengan warga etnis Jawa melalui aktifitas saling menghormati keberadaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi perasaan saling mencurigai diantara kedua kelompok etnis itu. Dalam pandangan mereka, asimilasi harus berjalan secara alami, tumbuh dari kesadaran setiap orang, dan tidak perlu dipaksakan melalui kebijakan pemerintah. Asimilasi yang direayasa justru akan memisahkan warga etnis Cina dari warga pribumi. Di wilayah tempat tinggal mereka, asimilasi sudah berlangsung lama dan berjalan secara alami. Wujud nyata dari asimilasi di Sudiroprajan adalah perkawinan campur antara etnis Cina dengan etnis Jawa. Disamping itu, persaudaraan antar warga juga tercermin melalui aktifitas kebudayaan, yaitu keterlibatan warga etnis Cina dan etnis Jawa dalam berbagai wujud kesenian yang ada, seperti *barongsai*, *liong*, dan *laras madya*.

Perkawinan campur sebagai wujud asimilasi yang paling nyata di Sudiroprajan, menurut para informan, merupakan peristiwa yang biasa, alami dan bisa terjadi dimana-mana. Dalam catatan seorang informan, pernikahan itu seharusnya melampaui batas-batas etnisitas, tidak bisa dipaksakan dan jangan pernah memaksa kepada siapa pun (untuk melakukan perkawinan campur). Di Sudiroprajan sendiri, perkawinan campur sudah berlangsung lama dan tidak pernah ada kebijakan dari pihak mana pun yang berusaha mengaturnya.

Tidak ada reaksi yang berlebihan dari para informan ketika saluran untuk menunjukkan identitas mereka dibuka kembali. Mereka menilai sebagai hal yang wajar, karena tidak merugikan pihak mana pun. Di wilayah tempat tinggal mereka, identitas kultural etnis Cina sudah lama diakui dan tidak pernah ada larangan dari warga etnis Jawa.

Dibukanya kembali saluran untuk menunjukkan identitas kultural, dalam catatan sebagian informan, merupakan wujud pengakuan pemerintah terhadap eksistensi warga etnis Cina. Sebagai kelompok etnis minoritas, orang Cina sudah mulai diberi ruang untuk menghidupkan kembali hak kebudayaan mereka. Ada ruang yang lebih bebas bagi orang Cina untuk mengekspresikan identitas kultural mereka.

Ciri yang menonjol dari etnis Cina generasi 60-an adalah bahwa mereka masih menjalankan kebia-

saan kultural orang Cina, yaitu sembahyang untuk arwah leluhur pada tanggal-tanggal tertentu menurut kalender Cina, sembahyang rebutan (*king hoo ping*) dan pergi ke makam leluhur (*cengbeng*) menjelang perayaan Imlek. Di wilayah Sudiroprajan, menurut pengamatan seorang informan, warga etnis Cina yang masih menjalankan kebiasaan kultural sudah semakin berkurang, karena mereka sudah menjadi penganut agama lain.

Dalam konteks penegasan terhadap identitas mereka sebagai orang yang memiliki garis keturunan Cina, sebagian besar informan menyebut diri mereka sebagai “orang Indonesia”, karena disamping mereka sudah “tidak murni lagi” sebagai orang Cina (ada garis keturunan Jawa), juga mereka merasa lahir, hidup dan kelak meninggal di Indonesia. Sedangkan seorang informan secara terbuka menyebut dirinya sebagai “orang Indonesia keturunan Cina”. Penegasan ini perlu disampaikannya, karena selama ini warga etnis Cina tidak cukup memiliki keberanian untuk menunjukkan identitas mereka di depan publik. Di wilayah tempat tinggalnya masih bisa ditemukan warga etnis Cina yang sebenarnya masih menjalankan ritual agama Khonghucu, tetapi dengan pertimbangan “mencari aman”, mereka terpaksa mengaku beragama lain (Buddha).

b. Pengalaman Etnis Cina Generasi 30-an

Dalam catatan pengalaman para informan, persoalan yang menjadi pemicu munculnya kerusuhan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan warga etnis Cina di Solo adalah kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi. Warga etnis Cina rata-rata kehidupan ekonomi mereka lebih baik dibandingkan etnis Jawa. Namun, dalam catatan seorang informan, orang Cina sebenarnya tidak bisa disalahkan dan keliru bila mereka dijadikan sasaran ketidak-puasan pribumi (orang Jawa). Sebab, mereka selama ini bekerja dengan keras, tekun dan ulet sehingga bisa berhasil. Sebaliknya, orang Jawa maunya mendapat pekerjaan yang enak dengan penghasilan yang besar, tetapi tidak bersedia bekerja keras. Dalam penilaian informan ini, orang Cina juga tidak bisa dikatakan tertutup karena setiap hari mereka bekerja hampir sepanjang waktu, sehingga wajar bila mereka butuh untuk beristirahat setelah bekerja.

Ada beragam pengertian tentang asimilasi yang dipahami oleh para informan etnis Cina generasi 30-an, namun muncul satu “kesepakatan” dari mereka bahwa asimilasi atau pembauran harus berjalan secara alami dan tidak perlu diatur dengan kebijakan pemerintah. Sebab, asimilasi tidak dimaksudkan untuk memaksa warga etnis Cina

melakukan tindakan yang belum tentu sesuai dengan keinginan mereka.

Secara tegas mereka mengatakan bahwa di wilayah Sudiroprajan tidak ada kebijakan asimilasi. Pembauran berjalan secara alami dan tidak pernah ada anjuran atau paksaan dari pihak mana pun juga. Seorang informan berharap bahwa pembauran jangan hanya ditujukan kepada warga etnis Cina saja, tetapi juga warga etnis lain yang digolongkan sebagai “pendatang”, seperti misalnya orang keturunan Arab dan India. Pembauran yang melibatkan banyak etnis akan mengurangi potensi terjadinya konflik antar etnis, kata informan tersebut.

Para informan memberikan tanggapan positif terhadap perkawinan campur. Menurut mereka, perkawinan campur bisa menjadi tali pengikat persaudaraan antar etnis. Mereka menganggap perkawinan campur sebagai peristiwa yang biasa dan tidak ada masalah sepanjang mereka yang akan menikah seiman. Di wilayah tempat tinggal mereka, sudah banyak terjadi perkawinan campur antara etnis Cina dengan etnis Jawa. Beberapa informan yang masih lajang merasa tidak keberatan jika kelak akan menikah dengan etnis lain.

Dalam catatan pengalaman para informan, meskipun ada suasana yang lebih bebas, tetapi tidak ada pengaruh yang besar ketika saluran untuk mengekspresikan identitas kultural mereka dibuka (kembali), karena sejak dulu

berbagai ekspresi kebudayaan Cina sudah ada dan diterima oleh masyarakat. Di tempat mereka bermukim, tidak pernah ada “larangan” dari orang Jawa terhadap orang Cina yang akan mengekspresikan identitas kultural mereka secara terbuka.

Dibukanya kembali saluran untuk mengekspresikan identitas kultural orang Cina, menurut mereka, merupakan wujud pengakuan pemerintah terhadap eksistensi orang Cina. Sebagai kelompok minoritas, warga etnis Cina sudah mulai diberi ruang kebebasan setelah sekian lama mengalami pengekangan. Pemerintah sekarang dinilai sudah lebih demokratis. Menurut seorang informan, disamping kesenian Cina yang bisa diekspresikan secara terbuka, juga banyaknya lembaga pendidikan bahasa Cina yang berdiri merupakan bukti lain bahwa pemerintah sudah memberi kebebasan kepada warga etnis Cina.

Ciri yang menonjol dari etnis Cina generasi 30-an adalah bahwa mereka sudah tidak lagi menjalankan kebiasaan kultural etnis Cina, kecuali seorang informan yang mengaku masih melakukan ritual *cengbeng* menjelang perayaan tahun baru Imlek. Mereka merasa sudah tidak mengerti lagi tujuan dan manfaat menjalankan kebiasaan kultural warisan leluhur.

Dalam konteks penegasan terhadap identitas mereka sebagai orang yang memiliki garis keturunan

Cina, para informan menyebut diri mereka sebagai “orang Indonesia”, sebab mereka lahir dan menetap di Indonesia, bahkan sudah tidak lagi mengerti adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, meskipun secara fisik dalam diri mereka ada garis keturunan Cina. Salah seorang informan secara lugas menyebut dirinya sebagai “orang Indonesia keturunan Cina” dan “bukan orang Cina” untuk menegaskan kembali bahwa ia dilahirkan di Indonesia dan sudah menjadi warga negara Indonesia.

2. Persoalan Pengakuan Identitas Kultural dan Eksistensi Etnis Jawa

a. Pengalaman Etnis Jawa Generasi 60-an

Dalam catatan pengalaman beberapa informan, pemicu munculnya kerusuhan sosial yang melibatkan orang Cina di Solo adalah kecemburuan sosial. Orang Cina yang dianggap sebagai pendatang memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik daripada orang Jawa. Dalam hampir setiap kerusuhan, kecemburuan dilampiaskan kepada warga etnis Cina. Namun informan lain justru mengingatkan perlunya belajar dari keberhasilan (ekonomi) orang Cina.

Sudiroprajan sendiri, menurut mereka, merupakan wilayah yang relatif aman dari kerusuhan anti Cina. Pergaulan antara orang Jawa dengan orang Cina yang sudah berlangsung lama menjadi salah satu

kekuatan yang membantu kedua kelompok etnis tersebut menghadapi tekanan-tekanan dari luar.

Ada beragam pengertian tentang asimilasi yang diberikan oleh para informan, namun pada intinya mereka memahaminya sebagai usaha untuk menciptakan persaudaraan antara warga etnis Cina dengan etnis Jawa dalam berbagai segi kehidupan dengan tidak membeda-bedakan asal keturunan. Asimilasi, menurut mereka, tidak selalu harus diwujudkan melalui perkawinan campur, tetapi bisa juga melalui berbagai kegiatan sosial-budaya yang melibatkan warga dari kedua kelompok etnis.

Dalam persepsi para informan, asimilasi merupakan peristiwa yang harus berjalan secara alami, tidak perlu ada rekayasa melalui aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Di wilayah Sudiroprajan sendiri, asimilasi yang dicerminkan oleh adanya perkawinan campur merupakan peristiwa yang biasa dan sudah berlangsung lama. Namun demikian, dalam catatan seorang informan, asimilasi itu seharusnya tidak hanya ditujukan kepada warga etnis Cina saja, tetapi perlu melibatkan warga keturunan yang lain.

Perkawinan campur, dalam pemahaman para informan, merupakan peristiwa yang biasa, sudah berlangsung lama dan berjalan secara alami, karena memang tidak pernah ada kebijakan yang mengaturnya. Perkawinan campur antara

orang Jawa dengan orang Cina banyak terjadi di kalangan strata bawah. Seorang informan mencoba menjelaskan alasan mengapa perkawinan campur banyak terjadi pada masyarakat lapis bawah. Menurut pendapatnya, ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu tingkat sosial-ekonomi yang rendah dan lingkup pergaulan yang terbatas. Ia memperkirakan 75% perkawinan campur di wilayah tempat tinggalnya adalah perkawinan antar tetangga.

Ada reaksi yang bertolak belakang dari para informan berkaitan dengan dibukanya kembali saluran bagi ekspresi identitas kultural orang Cina. Satu pihak mempersilakan identitas kultural orang Cina diekspresikan kembali dengan alasan bahwa dari dulu berbagai ekspresi kebudayaan Cina memang sudah ada, setidaknya yang mereka lihat dan alami di Sudiroprajan. Alasan lainnya, kehadiran (kembali) kebudayaan Cina bersama-sama dengan kebudayaan lokal lainnya dapat memperkaya kebudayaan bangsa. Sebaliknya, beberapa informan lain tidak setuju dengan dibukanya kembali saluran tersebut. Mereka mengkhawatirkan munculnya dominasi baru, yaitu dominasi kebudayaan. Padahal, kata mereka, orang Cina hingga sekarang masih melakukan dominasi di bidang ekonomi.

Dibukanya kembali saluran bagi ekspresi identitas kultural etnis Cina, dalam catatan sebagian informan, merupakan wujud penga-

kuan pemerintah terhadap eksistensi warga etnis Cina. Informan lain menegaskan, meskipun orang Cina diakui eksistensinya, tetapi ruang kebebasannya perlu dibatasi supaya mereka tidak mendominasi.

b. Pengalaman Etnis Jawa Generasi 30-an

Persoalan politik, menurut catatan pengalaman beberapa informan, merupakan pemicu munculnya kerusuhan sosial yang melibatkan warga etnis Cina di Solo. "Orang luar" menggunakan isu kesenjangan sosial untuk memprovokasi warga (pribumi) agar melakukan tindakan destruktif terhadap warga etnis Cina beserta berbagai fasilitas yang mereka miliki.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh seorang informan tentang penyebab terjadinya kerusuhan sosial di Solo. Ia menilai bahwa kerusuhan rasial yang terjadi berulang kali itu karena persoalan sejarah. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu melakukan tindakan diskriminasi melalui pembagian wilayah masing-masing kelompok etnis. Orang Arab di Pasar Kliwon, orang Cina di Sudiroprajan dan pribumi Jawa di Laweyan. Pembagian wilayah yang diskriminatif ini masih terasakan hingga sekarang. Pergaulan antar etnis sangat berjarak, masing-masing orang secara eksklusif hanya bergaul dengan *ingroup* mereka.

Wilayah Sudiroprajan, menurut mereka, merupakan wilayah yang

relatif aman dari kerusuhan anti Cina. Menurut seorang informan, dalam kerusuhan Mei 1998, Sudiroprajan dijadikan tempat penyimpanan mobil-mobil mewah orang Cina dari luar Sudiroprajan. Jadi, menurut informan tersebut, meskipun Sudiroprajan menjadi tempat bermukim orang Jawa *kere* (miskin) dan orang Cina *gereh* (ikan asin), namun aman terhadap berbagai tekanan dari luar yang berusaha merusak hubungan persaudaraan antar etnis.

Dalam pemahaman para informan, terjadinya konflik rasial dipicu oleh dua persoalan utama, yaitu kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik yang diprovokasikan oleh pihak luar. Kedua faktor tersebut sudah menjadi pemahaman yang berlaku secara umum di Sudiroprajan. Namun, konflik rasial yang terjadi berulang kali hampir tidak pernah menyentuh wilayah ini. Dalam kasus Sudiroprajan, secara horisontal perbedaan dalam konteks etnisitas sudah dianggap bukan lagi sebagai persoalan yang krusial, sehingga konflik vertikal yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi dapat dicegah secara maksimal. Penyebab konflik dipahami sebagai faktor yang datang dari luar (*exogenous*), bukan dari masyarakat itu sendiri (*endogenous*).

Asimilasi, menurut para informan, seharusnya dijalankan secara alami, sukarela dan tidak pula dipaksakan melalui berbagai kebijakan pemerintah yang represif.

Mereka secara tegas tidak setuju dengan program asimilasi yang pernah dijalankan pada masa Orde Baru yang melarang berbagai ekspresi identitas kultural etnis Cina. Merujuk pada gagasan Jary & Jary (1991), asimilasi yang dimaksudkan sebagai proses yang diarahkan bagi kelompok minoritas untuk mengadopsi nilai-nilai dan pola-pola kehidupan dari kelompok mayoritas (*host culture*) dianggap akan membawa kerugian ketika prosesnya berjalan secara tidak terbuka atau tidak sukarela. Sebab, menghilangkan identitas asal merupakan hal yang sangat sulit dilakukan, karena pada dasarnya identitas itu sendiri sudah menjadi semacam keyakinan ideologis.

Perkawinan campur, dalam kasus Sudiroprajan, sudah menjadi realitas sosial yang sangat lumrah. Hal yang menjadi penekanan dalam perkawinan campur di Sudiroprajan adalah kesamaan keyakinan agama dan kesediaan untuk menerima perbedaan dalam konteks etnisitas. Fenomena lain yang menonjol adalah bahwa perkawinan campur di Sudiroprajan banyak terjadi di kalangan strata sosial-ekonomi bawah dan lingkup pergaulan yang terbatas, sehingga mereka yang akan menikah sudah saling mengenal sebelumnya. Kesemua gejala sosial ini memperlihatkan bahwa perkawinan campur memiliki pola yang disebut *homogamy* (Thio, 1999). Artinya, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan meng-

hendaki adanya kesamaan-kesamaan dalam karakteristik sosialnya, seperti kelas sosial, rasial, dan keyakinan agama.

Para informan etnis Cina generasi 60-an dan 30-an menegaskan diri mereka sebagai "orang Indonesia", karena merasa sudah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir. Penegasan tersebut bermakna bahwa persoalan yang berkaitan dengan pengakuan identitas dan eksistensi etnis Cina sebenarnya sudah tidak lagi menjadi wacana yang serius untuk diperbincangkan, sejak mereka mengakui dan diakui sebagai warga negara Indonesia, paling tidak pengakuan yang diberikan oleh komunitas etnis Jawa di lingkungan permukiman mereka. Merujuk pada gagasan *Identity Negotiation Theory* (Gudykunst, 2002; Ting-Toomey, 1999) pengakuan yang diberikan terhadap identitas kultural etnis Cina merupakan hasil dari negosiasi, yaitu proses interaksi dimana setiap orang dalam situasi antar budaya berusaha menegaskan, mendefinisikan, merubah, mempertentangkan dan/atau mendukung citra diri yang diinginkan. Dalam pratiknya, negosiasi identitas membutuhkan waktu yang relatif lama.

C. PENUTUP

Konsep SARA yang diperkenalkan pada masa pemerintah Orde baru yang pada akhirnya secara hegemonik menguasai kesadaran masyarakat, tidak selamanya

merupakan persoalan murni akibat keragaman primordial. SARA akan muncul mejadi persoalan ketika terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik. Mencermati realitas semacam ini, maka pemerintah tidak selayaknya melakukan penyatuan dengan cara represif sebagai akibat dari adanya keragaman primordial, misalnya dengan kebijakan asimilasi. Integrasi terhadap keragaman kultural perlu dilakukan melalui komunikasi yang persuasif dengan tetap mempertahankan konteks kebudayaan setempat.

Hubungan yang setara antara warga kedua kelompok etnis tercermin dari adanya pengakuan terhadap perbedaan karakteristik kultural masing-masing kelompok. Kondisi seperti ini merupakan wujud dari bangunan multikulturalisme. Namun demikian, bangunan tersebut tidak sejalan dengan model bangsa Indonesia yang menekankan pada konsep *indigenous versus foreigners* (pribumi-orang asing). Konsep model atau bangunan yang lebih dekat dengan moto “Bhinneka Tunggal Ika” (*Unity in Diversity*) adalah *Third-Culture* atau Budaya Ketiga, yaitu integrasi yang terjadi antara dua kelompok atau lebih ke dalam sebuah kelompok baru. Dalam realitasnya, model budaya ketiga ini masih dipahami sebatas konsep.

DAFTAR PUSTAKA

- Beng, Tan Chee. 1997. Komentari “Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians?”. Dalam Leo Suryadinata ed. *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Casimir, Fred L. 1993. “Third-Culture Building: A Paradigm Shift for International and Intercultural Communication” Dalam Stanley A. Deetz, ed. *Communication Year Book/16*. Newbury Park, California: SAGE Publications.
- Charles A. Coppel. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dodd, Carley H. 1998. *Dynamics of Intercultural Communication (Fifth Edition)*. Mc.Graw-Hill, New York.
- Gudykunst, William B. 2002. “Intercultural Communication Theories” Dalam William B. Gudykunst, Bella Mody, ed. *Handbook of International and Intercultural Communication (Second Edition)*. Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc.
- Gudykunst, William B. 2002. “Issues in Cross-Cultural Communication Research” Dalam William B. Gudykunst, Bella Mody, ed. *Handbook of International and Intercultural Communication (Second*

- Edition*). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Gudykunst, William B. & Tsukasa Nishida. 1989. "Theoretical Perspective for Studying Intercultural Communication" Dalam Molefi K. Asante, William B. Gudykunst, ed. *Handbook of International and Intercultural Communication*. Newbury Park, California : SAGE Publications, Inc.
- I. Wibowo. 1999. "Catatan Pendahuluan" Dalam I. Wibowo, ed. *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Leo Suryadinata. 1997. "Ethnic Chinese in Southeast Asia: Overseas Chinese, Chinese Overseas or Southeast Asians?" Dalam Leo Suryadinata, ed. *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies.
- Rogers, Everett M. & Thomas M. Steinfatt. 1999. *Intercultural Communication*. Illinois : Waveland Press, Inc.
- Shuter, Robert. 1993. "On Third-Culture Building" Dalam Stanley A. Deetz, ed. *Communication Year Book/16*. Newbury Park, California: SAGE Publications.
- Thung Ju Lan. 1999. "Tinjauan Kepustakaan tentang Etnis Cina di Indonesia" Dalam I. Wibowo, ed. *Retrospeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusiu Liem. 2000. *Prasangka terhadap Etnis Cina, Sebuah Intisari*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Parsudi Suparlan. 2000. "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya" *Jurnal Antropologi Indonesia*. No. 63 Tahun XXIV. September-Desember.
- Parsudi Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". Dalam Simposium Internasional III *Jurnal Antropologi Indonesia*. Bali : Universitas Udayana.
- Artikel ini merupakan salah satu bagian dari disertasi "Mindfulness Dalam Komunikasi Antar Budaya".
 - Disertasi telah dipertahankan pada Sidang Senat Terbuka Universitas Indonesia tanggal 15 Januari 2004.